



RENCANA KERJA

PERUBAHAN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BONE



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan asumsi prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
- b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk menyesuaikan adanya perubahan yang terkait dengan perumusan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerinth Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022, diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 1 Agustus 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 40

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan Perubahan Rencana Kerja APBD 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Watampone , 1 Agustus 2022

Kepala Dinas

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bone Government (PEMERINTAH KABUPATEN BONE) and the Dinas Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DRAY VIBRIANTO, S.IP.M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip 19740315 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN	
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone	7
2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Sampai Triwulan II	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	
3.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah	34
3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	36
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel1.1. Bagan Alir Keterkaitan Renstra Dengan Rpjmd, Renstra K/L DanDengan Renja
Perangkat Daerah..... 2

TabelT.C. 29. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8

Tabel T.C.30. Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja..... 23

Tabel T.C.31. Tabel Review terhadap Ranwal RKPD 28

TabelT.C.32. Usulan Program Dan Kegiatan..... 34

TabelT.C. 33. Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Renja 2021 DanPrakiraan Renja
202.....48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

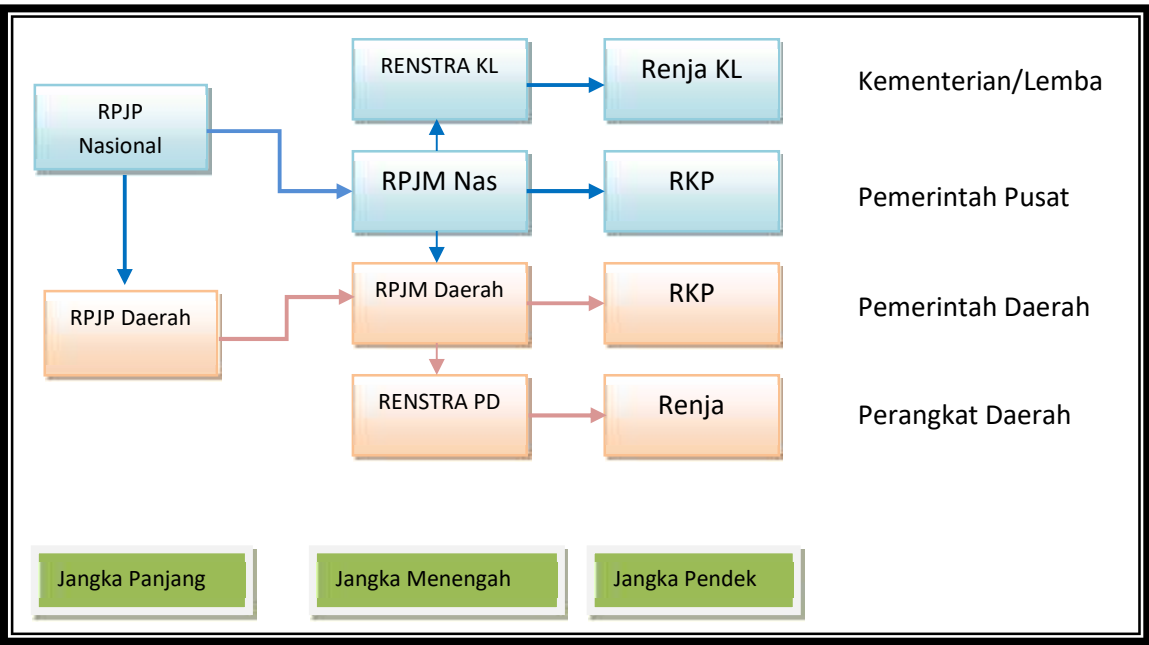
Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun

dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten tahun 2022 Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing. Dipilihnya tema ini adalah berdasarkan evaluasi capaian RPJMD dan Issue Strategis Nasional dan Issue Strategis Daerah yang perlu mendapat perhatian sebagai sebuah tahapan atau proses yang berkelanjutan dalam masa perwujudan RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas LH dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja DLH Tahun 2022 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri no 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kab Bone No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- s. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
- t. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata laksana Dinas Lingkungan Hidup.
- u. Peraturan Bupati Bone No 107 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta 2022

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah Melakukan Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2022.

Tujuan

1. Menjadi acuan dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan anggaran Perubahan (RKA-DLH) Tahun 2022
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan ; Menyajikan uraian tentang analisis gambaran pelayanan perangkat daerah berdasarkan target capaian kinerja Renja tahun berkenaan dan Renstra Perangkat Daerah, disertai analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan dua tahun berkenaan, hingga penetapan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di sisa tahun anggaran berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas rencana kerja perangkat daerah pada tahun perencanaan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN II
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dengan Anggaran Pokok Rp 13.026.204.600

Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Hingga Bulan Juni 2022

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Hingga Triwulan 2	Sisa Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.049.204.600,00	Rp 2.717.372.609,00	Rp 3.331.831.991,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 95.000.000,00	Rp 45.453.000,00	Rp 49.547.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.785.000.000,00	Rp 173.472.115,00	Rp 1.611.527.885,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 343.991.100,00	Rp 209.067.450,00	Rp 134.923.650,00
Program Pengelolaan Persampahan	Rp 4.344.008.900,00	Rp 2.568.922.740,00	Rp 1.775.086.160,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 80.000.000,00	Rp 33.541.600,00	Rp 46.458.400,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp 170.000.000,00	Rp 93.469.590,00	Rp 76.530.410,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 99.000.000,00	Rp 35.776.200,00	Rp 63.223.800,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 60.000.000,00	Rp 9.449.400,00	Rp 50.550.600,00
Total	Rp 13.026.204.600,00	Rp 5.886.524.704,00	Rp 7.139.679.896,00

Sumber data : Laporan Keuangan Juni 2022, DLH

(Tabel II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)

Evaluasi Renja

TC.29

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
				K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	1.07.01	Bidang Urusan Lingkungan Hidup																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	20.308.256.800	100	6.381.900.000	100	6.049.204.600	0,20	1.036.667.025	3,86	1.680.705.584	4,06	2.717.372.609	4,06	2.717.372.609	4,06	13,38
1		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100	337.000.000	100	90.000.000	100	57.083.350	0,33	8.181.640	0,33	10.212.250	0,67	18.393.890	0,67	18.393.890	0,7	5,46
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	215.000.000	5	65.000.000	4	30.924.000	1,00	7.566.690,00	2,00	9.203.460	3	16.770.150	3	16.770.150	0,23	0,08
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7	122.000.000	2	25.000.000	2	26.159.350	1,00	614.950,00	0,00	1.008.790	1	1.623.740	1	1.623.740	0,14	0,01
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi	100	15.141.590.800	100	4.750.000.000	100	4.718.438.600	0,25	753.970.344	0,25	1.401.230.593	0,49	2.155.200.937	0,49	2.155.200.937	0,5	14,23

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
			asi Keuanga n																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	156	15.141.590.800	12	4.750.000.000	624	4.718.438.600	153,00	753.970.344,00	153,00	1.401.230.593	306	2.155.200.937	306	2.155.200.937	1,96	0,14
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100	273.835.000	100	69.000.000	100	71.750.000	0,10	22.125.000	0,00	-	0,10	22.125.000	0,10	22.125.000	0,1	8,08
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	141.335.000	2	44.000.000	2	44.250.000	1,00	22.125.000,00	0,00	-	1	22.125.000	1	22.125.000	0,17	0,16
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang Yang Mengikuti BinteK implementasi peraturan perundangan - undangan	13	132.500.000	5	25.000.000	8	27.500.000	0,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminint rasi Umum	100	2.449.353.150	100	780.000.000	100	639.147.150	0,25	152.484.213	0,26	135.743.601	0,51	288.227.814	0,51	288.227.814	0,5	11,77

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	240.574.150	12	60.000.000,00	12	80.554.150	3,00		3,00	9.210.830,00	6	17.949.940	6	17.949.940	0,17	0,07
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	60.008.000	12	15.000.000	12	20.008.000	3,00	8.739.110,00	3,00	4.446.750,00	6	6.970.600	6	6.970.600	0,17	0,12
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	36	787.711.000	12	250.000.000	12	237.711.000	3,00	2.523.850,00	3,00	40.552.000	6	110.337.200	6	110.337.200	0,17	0,14
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	36	90.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	3,00	69.785.200,00	3,00	7.932.550	6	12.069.350	6	12.069.350	0,17	0,13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	36	186.000.000	12	80.000.000	12	21.000.000	3,00	4.136.800	3,00	5.020.000	6	8.780.000	6	8.780.000	0,17	0,05
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat	222	1.085.060.000	72	350.000.000	75	249.874.000	19,00	63.539.253	20,00	68.581.471	39	132.120.724	39	132.120.724	0,18	0,12

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
		dan Konsultasi SKPD	Koordina si																
3		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persenta se Pengadaa n Barang Milik Daerah	100	195.887.050	100	52.500.000	100	37.194.700	0,00	-	1,00	37.194.700	1,00	37.194.700	1,00	37.194.700	1,0	18,99
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaa n Meubel (unit)	8	47.825.700	1	2.500.000	4	10.325.700	0,00	-	4,00	10.325.700	4	10.325.700	4	10.325.700	0,50	0,22
		Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraa n operasion al (unit)	2	8.000.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaa n Peralatan dan mesin lainnya (unit)	11	140.061.350	3	50.000.000	5	26.869.000	0,00	-	5,00	26.869.000	5	26.869.000	5	26.869.000	0,45	0,19
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresent ase Penyedia an Jasa Penunjan g	100	1.210.350.800	100	405.400.000	100	326.350.800	0,25	63.206.805	25,00	63.627.141	25,25	126.833.946	25,25	126.833.946	25,3	10,48
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia an jasa komunika si	72	138.400.000	24	35.400.000	24	48.000.000	6,00	7.658.205	6,00	7.708.941,00	12	15.367.146	12	15.367.146	0,17	0,11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyedia an jasa pelayana n umum kantor	36	1.071.950.800	12	370.000.000,00	12	278.350.800	3,00	55.548.600	3,00	55.918.200,00	6	111.466.800	6	111.466.800	0,17	0,10

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I	II								
			yang disediakan																
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	700.240.000	100	235.000.000	100	199.240.000	0,25	36.699.023	0,15	32.697.299	0,40	69.396.322	0,40	69.396.322	0,4	9,91
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	2	387.750.000	3	130.000.000	3	107.750.000	1,00	11.325.023	1,00	28.887.299	2	40.212.322	2	40.212.322	1,00	0,10
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	39	41.490.000	10	10.000.000	14	15.490.000	3,00	2.150.000	2,00	3.810.000	5	5.960.000	5	5.960.000	0,13	0,14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	271.000.000	3	95.000.000	3	76.000.000	1,00	23.224.000	0,00	-	1	23.224.000	1	23.224.000	0,50	0,09
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	60	565.000.000	100	400.000.000	20	95.000.000	0,00	12.508.600	0,00	32.944.400	-	45.453.000	-	45.453.000	-	8,04

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
6		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusun an dan pelaksan aan Dokumen RPPLH	100	265.000.000	100	200.000.000	30	45.000.000	0,00	5.060.000	0,00	19.973.600	-	25.033.600	-	25.033.600	-	9,45
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	3	265.000.000	1	200.000.000	1	45.000.000	0,00	5.060.000	0,00	19.973.600	0	25.033.600	-	25.033.600	-	0,09
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusun an dan Penyelen ggaraan KLHS Kabupate n	100	300.000.000	100	200.000.000	100	50.000.000	0,00	7.448.600	0,00	12.970.800	-	20.419.400	-	20.419.400	-	6,81
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan Penyusun an KLHS dan Laporan pelaksana an dan laporan IKLH	7	300.000.000	3	200.000.000	2	50.000.000	0,00	7.448.600	0,00	12.970.800	-	20.419.400	-	20.419.400	-	0,07
		Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persenta se Peningka tan Pengend alian Pencema ran	60	2.910.500.000	100	520.500.000	20	1.785.000.000	0,20	49.639.180	17,46	123.832.935	17,66	173.472.115	17,66	173.472.115	29,44	5,96
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	cakupan pemanta uan Pencegah an pencema ran LH	100	2.340.000.000	100	230.000.000	100	1.635.000.000	0,19	42.133.980	19,05	94.344.935	19,24	136.478.915	19,24	136.478.915	19,2	5,83

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I	II								
		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Titik Pemanta uan Air, Udara dan tanah	30	1.820.000.000	80	80.000.000	30	1.465.000.000	3,00	4.034.070	5,00	37.926.135	8	41.960.205	8	41.960.205	0,27	0,02
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	34	520.000.000	10	150.000.000	12	170.000.000	5,00	38.099.910	3,00	56.418.800	8	94.518.710	8	94.518.710	0,24	0,18
9		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusak an (pemberian Informasi , pengisola sian dan Penghentian Kerusak an LH)	60	140.000.000	100	40.000.000	20	50.000.000	0,29	1.100.000	20,83	9.676.600	21,13	10.776.600	21,13	10.776.600	35,2	7,70

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberia n Informasi Pencema ran dan atau Kerusaka n LH	84	140.000.000	24	40.000.000	24	50.000.000	7,00	1.100.000	5,00	9.676.600,00	12	10.776.600	12	10.776.600	0,14	0,08
		Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Cakupan pelaksan aan Pemuliha n dan Pembina an terhadap sumber pencema r	60	430.500.000	100	250.500.000	20	100.000.000	0,13	6.405.200	12,50	19.811.400	12,63	26.216.600	12,63	26.216.600	21,0	6,09
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah Pemanta uan lokasi Pembersi han Unsur Pencema r	60	210.500.000	12	30.500.000	24	100.000.000	3,00	6.405.200	3,00	19.811.400,00	6	26.216.600	6	26.216.600	0,10	0,12
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Instalasi Pengolah an Limbah Ternak	10	220.000.000	10	220.000.000	0	0	0,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pemanta uan dan pengawa san pelaksan aan konserva si keanekar agaman hayati;	60	908.000.000	100	50.000.000	20	343.991.100	0,33	108.929.050	26,67	100.138.400	27,00	209.067.450	27,00	209.067.450	45,00	23,03

	Sasaran	Instansi/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
11		Pengelolaan keaneka ragaman Hayati kab/kota	Cakupan pengelol aan keanekar agaman hayati;	60	908.000.000	100	50.000.000	20	343.991.100	0,33	108.929.050	26,67	100.138.400	27,00	209.067.450	27,00	209.067.450	45,0	23,03
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah titik Pengelola an Ruang Terbuka Hijau	15	908.000.000	1	50.000.000	15	343.991.100	5,00	108.929.050	4,00	100.138.400,00	9	209.067.450	9	209.067.450	0,60	0,23
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangan i di Kabupate n Bone	40	16.285.000.000	100	5.460.000.000	35	4.344.008.900	0,25	1.183.433.900	0,25	1.385.488.840	0,50	2.568.922.740	0,50	2.568.922.740	1,25	15,77
		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangan i diwilayah Perkotaa n	80	16.285.000.000	100	5.460.000.000	75	4.344.008.900	0,25	1.183.433.900	0,25	1.385.488.840	0,50	2.568.922.740	0,50	2.568.922.740	0,6	15,77
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah Penyusun an dan pelaksana an Kebijakan Pengelola an Persampa han (jakstrada)	3	220.000.000	1	75.000.000	1	215.000.000	0,00	-	0,00	8.964.400,00	0	8.964.400	-	8.964.400	-	0,04

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I	II								
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pe ngolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)	42,705	15.500.000.000	14235	5.000.000.000	14235	4.049.008.900	3607,00	1.182.933.900	3500,00	1.315.388.240,00	7107	2.498.322.140	7.107	2.498.322.140	166,42	0,16
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibentuk untuk pengelolaan persampahan (klp)	49	265.000.000	5	85.000.000	22	80.000.000	0,00	500.000	0,00	61.136.200,00	0	61.636.200	-	61.636.200	-	0,23
			Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	11,100		35		3,700				0,00		0		-		-	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)	3	300.000.000	3	300.000.000	0	0	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
	Meningkatnya Kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	30	245.000.000	100	80.000.000	10	80.000.000	1,51	12.085.200	1,89	21.456.400	3,40	33.541.600	3,40	33.541.600	11,32	13,69
13		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	20	245.000.000	100	80.000.000	19	80.000.000	1,51	12.085.200	1,89	21.456.400	3,40	33.541.600	3,40	33.541.600	17,0	13,69
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	151	245.000.000	43	80.000.000	53	80.000.000	0,80	12.085.200	1,00	21.456.400,00	1,80	33.541.600	2	33.541.600	0,01	0,14
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80	505.000.000	100	160.000.000	75	170.000.000	0,18	46.594.190	12,50	46.875.400	12,68	93.469.590	12,68	93.469.590	15,84	18,51

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I	II								
		DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
14		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha/Ke giatan yang taat terhadap izin lingkunga n	156	505.000.000	100	160.000.000	48	170.000.000	0,18	46.594.190	12,50	46.875.400	12,68	93.469.590	12,68	93.469.590	8,1	18,51
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Ijin Lingkunga n yang dikaji	95	205.000.000	60	60.000.000	15	70.000.000	7,00	36.707.990	3,00	15.421.500,00	10,00	52.129.490	10	52.129.490	0,11	0,25
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/Ke giatan yang diawasi	195	300.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	7,00	9.886.200	7,00	31.453.900,00	14,00	41.340.100	14	41.340.100	0,07	0,14

	Sasaran	Instansi/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	60	299.000.000	100	100.000.000	20	99.000.000	100,00%	19.115.800	0,00	16.660.400	1,00	35.776.200	1,00	35.776.200	1,67	11,97
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	60	299.000.000	100	100.000.000	20	99.000.000	100,00%	19.115.800	0,00	16.660.400	1,00	35.776.200	1,00	35.776.200	1,7	11,97
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibangun	23	299.000.000	5	100.000.000	8	99.000.000	8,00	19.115.800	0,00	16.660.400,00	8	35.776.200	8	35.776.200	0,35	0,12
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	97	215.000.000	100	75.000.000	95	60.000.000	0,33	4.324.200	16,67	5.125.200	17,00	9.449.400	17,00	9.449.400	17,53	4,40
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	95	215.000.000	100	75.000.000	95	60.000.000	0,33	4.324.200	16,67	5.125.200	17,00	9.449.400	17,00	9.449.400	17,9	4,40

	Sasaran	Instansi/Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023(Akhir Periode Renstra perangkat daerah) 2021-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II							
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Jumlah Pelayana n pengadua n masyarakat at yang ditindakla njuti (layanan)	37	215.000.000	12	75.000.000	12	60.000.000	4,00	4.324.200	2,00	5.125.200,00	6,00	9.449.400	6	9.449.400	0,16	0,04

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi lingkungan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

(Tabel III Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam Tabel C– 30)

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP			B	BB	BB	A	B	BB	BB	A	
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			4	5	4	4	4	5	4	4	
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			2	2	2	3	2	2	2	3	
Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	12	52	12	12	12	52	
Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal			0	2	2	2	0	2	2	2	
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bintek			2	5	8		2	5	8		

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	12	12	12	0	12	12	12	
Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor			0	12	12	12	0	12	12	12	
Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan			0	12	12	12	0	12	12	12	
Jumlah Laporan Pembayaran Media			12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi			50	72	75	75	50	72	75	75	
Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi				1				1			
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Pengadaan Meubel (unit)			2	1	4	3	2	1	4	3	
Jumlah Pengadaan kendaraan Operasional						2				2	
Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)			3	3	5	3	3	3	5	3	
Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi			24	24	24	24	24	24	24	24	
Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin			3	3	3	3	3	3	3	3	
jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			7	10	15	15	7	10	15	15	
jumlah gedung kantor yang dipelihara			3	3	3	3	3	3	3	3	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
jumlah Penyiapan lahan atau pemeliharaan Lahan											
1.1. Indeks Kualitas Air		IKK	52,00	52,60	52,70	52,80	52,00	46,67	52,70	52,80	
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH			-	30%	30%	40%	-	30%	30%	40%	
Jumlah Dokumen RPPLH			-	1	1	1	-	1	1	1	
Jumlah Laporan Pelaksanaan RPPLH											
Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan pelaksanaan dan laporan IKLH			2	3	2	2	2	3	2	2	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH			1	1	1		1	1	1		
Jumlah Titik Pemantauan Air, Udara dan tanah			60	80	30	30	60	80	80	30	
Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.			10	10	10	10	10	10	10	10	
persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH			12	24	24	36	12	24	24	36	
Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar				20%	20%	20%		20%	20%	20%	
Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Unsur Pencemar			12	12	24	24			24	24	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak			0	10	0	0	0	10	0	0	
1.2. Indeks Kualitas Udara		IKK	75	90,62	90,72	90,82	75	88 4/7	90	90	
Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;			-	20%	20%	20%	-	20%	20%	20%	
Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;				20%	20%	20%		20%	20%	20%	
Jumlah titik pengelolaan Ruang terbuka Hijau				1	15	15		1	15	15	
1.3 Penghargaan Adipura		IKK	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura		Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Adipura	
Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone			25%	30%	35%	40%	25%	30%	35%	40%	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah Perkotaan			60%	75%	75%	80%	60%	75%	75%	80%	
Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)			1	1	1	1	1	1	1	1	
Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)		IKK	14000	14243	14243	14243	1400	14000	14243	14243	
Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp)			0	5	22	22	0	5	22	22	
Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	SDG's		0	3500	3700	3900	0	3500	3700	3900	
Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)			2	3			2	3			
Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan		IKK		49%	50%	53%		70	75		

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	SDG's		5%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	
Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3		IKK	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)			35	43	53	55	35	44	53	55	
Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan		IKK	60%	70%	75%	80%	60%	70%	75%	80%	
Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan			33	42	48	56	33	42	48	56	
Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji			55	60	15	20	55	40	15	20	
Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi			55	60	65	70	55	60	65	70	
Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022(Tahun n)	Tahun 2023(Tahun n+1)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina			5	5	8	10	5	5	8	10	
Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup		IKK	90%	95%	95%	100%	90%	95%	95%	100%	
Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan			100%	90%	95%	100%	100%	90%	95%	100%	
Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)			8	10	12	15	10	12	12	15	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan pertama urusan lingkungan hidup, adalah:



Gambar 1 Titik sampah liar di Jalan Kinabalu Kelurahan Macanang



Gambar 2 Pemasangan Papan Informasi di titik Sampah Liar

Pengelolaan persampahan yang masih saja menjadi isu utama dalam urusan lingkungan Hidup tentu saja menjadi perhatian yang besar bagi Dinas Lingkungan Hidup.

Memaksimalkan semua sarana dan prasarana yang ada dengan mengubah strategi pengangkutan dari TPS ke TPA, mengurangi titik titik sampah liar, menebar papan informasi dan strategi lainnya yang dilaksanakan Bersama stake holder terkait dalam hal ini Pemerintah Kecamatan, kelurahan dan Juga Satuan Polisi Pamong Praja.

- ♦ Strategi Preventif yang dilakukan dalam meningkatkan Kualitas Lingkungan adalah strategi dalam pengendalian pencemaran dengan melaksanakan Pembinaan kampung Iklim, Pemantauan Kualitas air tanah dan Udara serta melakukan Pengawasan Limbah B3 dan Pengawasan terkait ketaatan pelaksanaan Ijin Lingkungan.
- ♦ Strategi Represif dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan ijin lingkungan dengan melakukan teguran teguran kepada pihak pengembang perumahan yang tidak menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.
- ♦ Pengelolaan RTH yang banyak menjadi sorotan dari masyarakat terkait adanya beberapa taman kota yang dinilai terbengkalai kini mulai ditata ulang secara bertahap dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada, meningat urusan RTH yang semula urusan Pertamanan menjadi tanggung jawab Dinas perumahan dan permukiman tahun ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup .

Penambahan urusan yang tidak disertai dengan penambahan anggaran, diharapkan di Perubahan APBD mendapat tambahan anggaran pengelolaan.

- ♦ Adanya Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Tahun 2022 sehingga Penganggaran Upah kerja Operasional persampahan hanya sampai dibulan September sehingga diperlukan adanya penambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan Pembayaran upah Kerja Sampai kebulan Desember 2022.;
- ♦ Belum adanya Aplikasi yang memuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup, diharapkan pada Anggaran perubahan bisa dianggarkan pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD sebagai aplikasi perijinan yang diharapkan bisa terintegrasi dengan aplikasi OSS



Gambar 3 Pengelolaan Hutan Kota, Islamic Center Kelurahan Biru



BAB III

Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DLH; dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup.

3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang meliputi analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam perumusan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Perubahan renja ini dapat dilakukan pada rumusan indikator dan target kinerja (outcome/output), lokasi beserta anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah dengan tetap mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten serta keselarasannya dengan Perubahan RKPD Kabupaten

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang telah diuraikan pada Bab II, serta memperhatikan perubahan indikator dan target kinerja Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka penyesuaian anggaran program dan kegiatan yang dilakukan dalam perubahan renja ini meliputi; penyesuaian pagu anggaran sesuai dengan perubahan target indikator kinerja tahun 2022, pergeseran anggaran antar kegiatan sesuai perkiraan kebutuhan belanja hingga akhir tahun, serta penambahan anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan yang masih memerlukan tambahan dana untuk pencapaian target kinerjanya

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil di sisa tahun anggaran berjalan, yang disesuaikan dengan target kinerja (outcome dan output) yang akan dicapai, maka rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**TABEL 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
						(PMDN 90 & Kepmendagri 050-3708)	(PMDN 90 & Kepmendagri 050-5889)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja Pokok 2022	Renja Perubahan 2022		
										13.026.204.600	13.634.675.600		
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	6.049.204.600	5.731.074.250	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum- Danan Alokasi Umum
2	1	0	2,0		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	100%	57.083.350	57.083.500	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum Dana alokasi Umum
2	1	0	2,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.924.000	30.924.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		26.159.350	26.159.500	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	100%	4.718.438.600	4.363.351.400	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624	49 OB	4.718.438.600	4.363.351.400	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	100%	71.750.000	22.125.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 5	0 9	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	44.250.000	22.125.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang Yang Mengikuti BinteK implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5Orang	0	27.500.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100	100%	639.147.150	724.776.350	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.554.150	55.512.350	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.008.000	14.097.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	237.711.000	237.711.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	27.650.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.000.000	21.000.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Lpaoran	85 Lpaoran	249.874.000	281.806.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	87.000.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 7		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100%	37.194.700	104.597.200	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Alapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	-	-	

2	1 1	0 1	2,0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Paket	10.325.700	10.325.700	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10 Unit	26.869.000	94.271.500	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100	100%	326.350.800	302.470.800	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24 Laporan	48.000.000	36.000.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	278.350.800	266.470.800	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100%	199.240.000	156.670.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3 Unit	107.750.000	113.000.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 1	2,0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14 Unit	15.490.000	14.980.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 1	2,0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3 Gedung	76.000.000	28.690.000	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 2			Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20	20%	95.000.000	75.670.400	Kec Tanete Riattang barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 2	2,0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	30	30%	45.000.000	39.950.400	Kec Tanete Riattang Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 2	2,0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1 Dokumen	45.000.000	39.950.400	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 2	2,0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan n KLHS Kabupaten	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100	100%	50.000.000	35.720.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 2	2,0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan pelaksanaan dan laporan IKLH	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	2 Dokumen	50.000.000	35.720.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 3			Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20	20%	1.785.000.000	1.758.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 3	2,0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100	100%	1.635.000.000	1.613.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 3	2,0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Titik Pemantauan Air, Udara dan tanah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30	30dokmen	1.465.000.000	1.443.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
2	1 1	0 3	2,0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	12 Desa	170.000.000	170.000.000	10 Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 3	2,0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	persentase Pelaksanaan Penanggulanga n Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)	20	20%	50.000.000	45.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 3	2,0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	24	24 Kegiatan	50.000.000	45.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 3	2,0 3		Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	20	20%	100.000.000	100.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 3	2,0 3	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24	24 dokumen	100.000.000	100.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 4			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	20	20%	343.991.100	424.044.650	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 4	2,0 1		Pengelolaan keanekaragaman Hayati kab/kota	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	20	20%	343.991.100	424.044.650	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 4	2,0 1	0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah titik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Ha	15 Ha	343.991.100	424.044.650	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	35	35%	4.344.008.900	5.218.886.300	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 1	2,0 1		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah Perkotaan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah Perkotaan	75	75%	4.344.008.900	5.218.886.300	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	1 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	1 Dokumen	215.000.000	205.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 1	2,0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	14235 Ton	14235 Ton	4.049.008.900	4.937.886.300	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 1	2,0 1	0 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp)	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22	22 Kelompok	80.000.000	76.000.000	Kec Tanete Riattang, Kec TR Barat, Kec Tr Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	10	10%	80.000.000	77.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 5	2,0 1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	19	19%	80.000.000	77.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 5	2,0 1	0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	53	53 Ton	80.000.000	77.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	75	75%	170.000.000	168.000.000	Semua Kecamata n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 6	2,0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	48	48%	170.000.000	168.000.000	Semua Kecamata n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 6	2,0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	15 Rekomenda si	70.000.000	86.000.000	Semua Kecamata n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 6	2,0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65	65 Usaha	100.000.000	82.000.000	Semua Kecamata n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	20	20%	99.000.000	144.000.000	Semua Kecamata n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum

2	1 1	0 8	2,0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	20	20%	99.000.000	144.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	0 8	2,0 1	0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	8	8 Sekolah	99.000.000	144.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	95	95%	60.000.000	38.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 0	2,0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	95	95%	60.000.000	38.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 0	2,0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12	12 Layanan.	60.000.000	38.000.000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												13,026,204,600	13,634,675,600				16,610,000,000	
2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,049,204,600	5,731,074,250				6,625,000,000	
2	1	0	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												57,083,350	57,083,500				135,000,000	
2	1	0	2.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	persentase penyediaan dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	30,924,000	30,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,000,000
2	1	0	2.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	persentase penyediaan dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	26,159,350	26,159,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	55,000,000
2	1	0	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,718,438,600	4,363,351,400				5,000,000,000	
2	1	0	2.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,718,438,600	4,363,351,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,000,000,000
2	1	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												71,750,000	22,125,000				50,000,000	
2	1	0	2.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	2 Orang	1 Orang	100 %	100 %	44,250,000	22,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50,000,000
2	1	0	2.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Orang	0 Orang	100 %	100 %	27,500,000	0			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	1	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah												639,147,150	724,776,350				840,000,000	
2	1	0	2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	80,554,150	55,512,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022												Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210203					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	20,008,000	14,097,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	30,000,000		
210204					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	237,711,000	237,711,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	240,000,000		
210205					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	30,000,000	27,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	40,000,000		
210206					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Media	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	30,000,000		
210209					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	75 Rapat	75 Rapat	100 %	100 %	249,874,000	281,806,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	300,000,000		
210201					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen		1 Paket	100 %	100 %	0	87,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100,000,000		
210207					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											37,194,700	104,597,200	60,000,000						
210205					Pengadaan Mebel	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	10,325,700	10,325,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20,000,000		
210206					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peraltan dan mesin lainnya (unit)	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	5 Unit	10 Unit	100 %	100 %	26,869,000	94,271,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	40,000,000		
210208					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											326,350,800	302,470,800	320,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2102	1108	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	24 Rekening	24 Rekening	100 %	100 %	48,000,000	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	55,000,000	
2102	1108	20	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	278,350,800	266,470,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	265,000,000	
211	011	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											199,240,000	156,670,000	220,000,000					
211	0109	201		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	3 Unit	6 Unit	100 %	100 %	107,750,000	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	120,000,000	
211	0109	206		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	15,490,000	14,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20,000,000	
211	0109	209		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	76,000,000	28,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,000,000	
211	012			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											95,000,000	75,670,400	110,000,000					
211	012	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											45,000,000	39,950,400	50,000,000					
211	012	201		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	cakupan penyusunan dan pelaksanaan dokumen RPPLH	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 %	30 %	45,000,000	39,950,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20 Persen	50,000,000	
211	012	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											50,000,000	35,720,000	60,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
210202					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan penyusunan KLHS dan laporan pelaporan pelaksanaan dan laporan IKLH	Cakupan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	30 %	50,000,000	35,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20 Persen	60,000,000
2113	013				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										1,785,000,000	1,758,000,000	2,105,000,000					
2113	013	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										1,635,000,000	1,613,000,000	1,930,000,000					
2113	013				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Paket Pengadaan Onlimo Jumlah titik pemantauan, air, udara, dan tanah	Cakupan pemantauan pencegahan pencemaran LH	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 Paket 30 Lokasi	1 Paket 30 Lokasi	100 %	100 %	1,465,000,000	1,443,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 %	1,750,000,000
2113	013				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	Cakupan pemantauan pencegahan pencemaran LH	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	170,000,000	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 %	180,000,000
2113	023				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										50,000,000	45,000,000	55,000,000					
2113	023				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase pelaksanaan penanggulangan kerusakan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian kerusakan LH)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	24 Kegiatan	24 Kegiatan	20 %	20 %	50,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 %	55,000,000
2113	033				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										100,000,000	100,000,000	120,000,000					
2113	033				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Sumber Pencemar	cakupan pelaksanaan pemulihan dan pembinaan terhadap sumber pencemar	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	24 Kegiatan	24 Kegiatan	20 %	20 %	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 %	120,000,000
2114	014				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										343,991,100	424,044,650	500,000,000					
2114	014	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										343,991,100	424,044,650	500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
211020	14014				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah laporan pengelolaan Ruang terbuka Hijau	cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Bone, Tanete Riattang, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Semua Kelurahan		20 Persen	1 laporan	1 laporan	20 %	20 %	343,991,100	424,044,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	20 Persen	500,000,000
21105					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										80,000,000	77,000,000	120,000,000					
21105		201			Penyimpanan Sementara Limbah B3										80,000,000	77,000,000	120,000,000					
21105		2012			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	persentase peningkatan pengelolaan limbah B3	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	53 Ton	53 Ton	19 %	19 %	80,000,000	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	10 %	120,000,000
21106					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										170,000,000	168,000,000	230,000,000					
21106		201			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										170,000,000	168,000,000	230,000,000					
21106		2011			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	15 Izin LH	15 Izin LH	48 %	48 %	70,000,000	86,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	75 %	80,000,000
21106		2013			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	65 Usaha	65 Usaha	48 %	48 %	100,000,000	82,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	75 %	150,000,000
21108					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										99,000,000	144,000,000	135,000,000					
21108		201			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										99,000,000	144,000,000	135,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2102	108	201	02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	persentase pengembangan kelompok masyarakat peduli lingkungan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	8 Sekolah	8 Sekolah	20 %	20 %	99,000,000	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	95 Persen	135,000,000
211	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										60,000,000	38,000,000				100,000,000		
211	10	201			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										60,000,000	38,000,000				100,000,000		
211	10	201	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	persentase pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %	12 layanan	12 layanan	95 %	95 %	60,000,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup	95 %	100,000,000
211	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										4,344,008,900	5,218,886,300				6,685,000,000		
211	11	201			Pengelolaan Sampah										4,344,008,900	5,218,886,300				6,685,000,000		
211	11	201	01		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di wilayah perkotaan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Semua Kelurahan		35 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	215,000,000	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	35 %	85,000,000
211	11	201	03		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di wilayah perkotaan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Semua Kelurahan		35 %	14.235 Ton	14.235 Ton	75 %	75 %	4,049,008,900	4,937,886,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	35 %	6,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	1	1	2.	0	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp) Jumlah Pengurangan Sampah dari Hasil Pembinaan	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di wilayah perkotaan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Semua Kelurahan		35 %	22 Kelompok 3.7 Ton	22 Kelompok 3.7 Ton	75 %	75 %	80,000,000	76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	35 %	100,000,000
TOTAL																	13,026,204,600	13,634,675,600				16,610,000,000